



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - kabupaten otonom di Propinsilrian Jaya Baran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika;
7. Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan kedinasan keluar daerah;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 3

Perjalanan Dinas Keluar Daerah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Ketua DPRD sama dengan Perjalanan Dinas Bupati;
- (2) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Wakil-wakil Ketua DPRD sama dengan Perjalanan Dinas Wakil Bupati;
- (3) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD sama dengan Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Lampiran Hak Keuangan Perjalanan Dinas Ketua DPRD dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
REMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NO	Uraian	Biaya Transportasi (Tiket)	Uang Harian / Uang Makan/Uang saku/Uang transportasi lokal	Uang saku kegiatan bimtek luar daerah	PENGINAPAN HOTEL		Keterangan
					Bintang Lima 6	Bintang Empat 7	
1	Keluar Wilayah Kabupaten Mimika	Sesuai Biaya Riiil yang berlaku (Fasilitas dan kelas Transport) Bisnis untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 6.000.000,00/ orang/hari untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.000.000,00/ orang/hari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 4.000.000,00/ orang/hari untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD		Lamanya perjalanan dinas untuk Papua maksimal 5 hari dan Luar Papua 7 hari jika lebih dari itu harus dibuktikan dengan surat /undangan dari daerah tujuan. Untuk kegiatan Bimtek Luar Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD hanya mendapat uang saku sesuai bagan kolom lima (5) untuk penginapan bila ditanggung oleh pihak pelaksana maka biaya Bimtek inklude / disatukan dengan biaya yang telah dianggarkan oleh pihak pelaksana. Bila biaya penginapan tidak termasuk dalam biaya Bimtek maka dapat mempergunakan biaya penginapan sesuai kolom enam (6) dan kolom tujuh (7). Biaya penginapan berlaku dengan menggunakan biaya Riiil.
		Kelas Ekonomi Anggota DPRD	Rp. 5.500.000,00 orang /hari untuk Anggota DPRD	Rp. 1.750.000,00 orang/hari untuk Anggota DPRD	Rp. 2.500.000,00 orang/hari untuk Anggota DPRD		

Salinan sesuai dengan aslinya
 BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG

